

PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA BONGKUDAI SELATAN KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGODOW TIMUR

Oleh :
Indra Richard Rompas¹

ABSTRAK

Perhatian terhadap perilaku memilih di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan era transisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan dengan partai atau kelompok tertentu. Dalam situasi yang bebas tersebut hasil pemilihan umum menjadi lebih sulit diperkirakan, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu pada jaman orde baru, dimana peranan dan intervensi pemerintah dalam memobilisasi massa menjelang pemilu terlihat begitu nyata, dengan jumlah partai yang terbatas, dimana terdapat satu partai dominan, hasil pemilu orde baru relatif mudah diperkirakan. Partisipasi para pemilih pemula dalam menentukan pilihannya biasanya ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Para pemilih pemula biasanya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepentingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas ideologi politiknya, lebih banyak memihak kepentingan umum dan sebagainya. Para pemilih pemula biasanya masih mencari partai atau figur yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Maka dari itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk ditarik menjadi pendukung mereka. Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut *swing voters* sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat merugikan sistem politik. Di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, terlihat ada beberapa factor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih. diantaranya factor sosiologis seperti asal daerah calon legislatif, dan hubungan keluarga dengan calon pemilih, kemudian factor psikologis yakni hubungan kedekatan yang dibangun oleh para calon anggota legislatif serta tim sukses untuk presiden dan wakil presiden dengan berbagai instrument seperti uang dan pemberian lainnya, serta factor rasional yang berkaitan dengan program dan figure yang ditawarkan oleh partai dan juga rekam jejak yang dimiliki dari calon dan para tim sukses.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih: Pemilih Pemula: Pemilu

ABSTRACT

Attention to voting behavior in Indonesia has increased in line with the era of democratic transition which, among others, marked by the presence of free and honest

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi

elections. Free elections are made to make voters more independent in determining their political choices. Voters are no longer associated with particular parties or groups. In such a free situation the results of general elections become more difficult to predict, this is different from the elections in the New Order era, where the role and intervention of the government in mobilizing the masses ahead of the election seemed so real, with a limited number of parties, where there was a dominant party, the results of the New Order elections are relatively easy to predict. The participation of novice voters in determining their choices is usually determined based on manifesto or merely emotional connection. Novice voters usually have a strong commitment to the political interests of their people, are more independent and free in their political choices, clearer political ideology, more in favor of the public interest and so on. Beginner voters are usually still looking for parties or figures that are considered appropriate for their vote, and they are voters who are in the stage of knowing politics and are still easily influenced by very intense socialization. Therefore, novice voters are often targeted by political parties to be drawn into their supporters. The process of changing the attitudes of the voters is also influenced by several factors including knowledge, ideology, environment and various things that can provide their knowledge of the prospective leaders who will be chosen. Changing behavior from voters shows that the voters are not yet in the mature voters because at any time they can change according to conditions and times. Besides voters who are still in a state of uncertainty or often called swing voters are very beneficial for political actors but very detrimental to the political system. In the village of South Bongkudai in the 2019 general election, it was seen that there were several factors that influenced the novice voter to vote. including sociological factors such as regional origin of legislative candidates, and family relations with prospective voters, then psychological factors namely the closeness relationship established by legislative candidates and the success team for the president and vice president with various instruments such as money and other gifts, and rational factors relating to the programs and figures offered by the party and also the track record of the candidates and success teams.

Keywords: Voter Behavior: Beginner Voters: Elections

PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya reformasi secara formal Indonesia telah diakui sebagai negara demokrasi. Audit-audit demokrasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga-lembaga internasional menempatkan Indonesia dalam kategori rezim demokrasi. Penilaian tersebut otomatis mengeluarkan Indonesia dari kelompok rezim-rezim kediktatoran. Salah satu unsur penyebabnya adalah keberhasilan Indonesia menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999 (Priyono, 2014: xiii). Dalam perkembangannya, proses demokratisasi terus berlangsung hingga merambah ke ranah lokal melalui desentralisasi. Interpretasi dari desentralisasi dalam hal ini merujuk pada pengertian devolusi (desentralisasi politik), yakni yang menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Nordholt dan Klinken, 2007:16). Di titik ini pula, desentralisasi melalui wujud otonomi daerah berperan penting dalam konsolidasi demokrasi. Peran tersebut berasal dari adanya proses demokrasi yang memotivasi otoritas lokal dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat local.

Perhatian terhadap perilaku memilih (*voting behavior*) di Indonesia mengalami peningkatan setidaknya sejak sepuluh tahun terakhir, sejalan dengan era

transisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya pemilihan umum yang bebas dan jujur (*free and fair elections*). Pemilihan umum masa reformasi sejak tahun 1999 dan pemilihan umum presiden tahun 2004 oleh sementara pihak dipandang sebagai tonggak sejarah yang menandai masuknya Indonesia ke dalam jajaran negara-negara demokrasi. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan dengan partai atau kelompok tertentu. Dalam situasi yang bebas tersebut hasil pemilihan umum menjadi lebih sulit diperkirakan, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu pada jaman orde baru, dimana peranan dan intervensi pemerintah dalam memobilisasi massa menjelang pemilu terlihat begitu nyata, dengan jumlah partai yang terbatas, dimana terdapat satu partai dominan, hasil pemilu orde baru relatif mudah diperkirakan. Oleh karena itu, pemilihan umum semasa orde baru tidak pernah dikategorikan sebagai pemilihan umum yang bebas dan jujur.

Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan umum sangat menentukan legitimasi terhadap partai yang berkuasa. Semua warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat, termasuk di dalamnya pemilih pemula, sehingga semua rakyat Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan pemilih pemula yang baru mempunyai hak suara untuk turut memilih dalam Pemilihan Umum pun menjadi penting.

Partisipasi politik untuk pemilih pemula biasanya berasal dari kalangan siswa SMU dan mahasiswa semester awal, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan umum, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih para wakil rakyatnya. Namun, para pemilih pemula harus menyadari bahwa kegiatan Pemilu menentukan masa depannya serta masyarakat dan bangsanya.

Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang harus diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan tersebut mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih dan untuk tidak memilih, bagaimana pengaruh orang tua dalam membentuk sikap mereka, dan bagaimana pengaruh media sosialisasi lainnya dalam mempengaruhi pemikiran dan sikap politik para pemilih pemula ini.

Menelaah perilaku pemilih untuk dapat melihat partisipasi para pemilih pemula tersebut dalam menentukan pilihannya yang ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Tindakan atau keputusan politik seorang pemilih ditentukan oleh perilaku, sikap dan persepsi politik. Tindakan tersebut berkaitan dan mempunyai kesamaan dengan partisipasinya dalam kehidupan politik, pemilih sebagai individu yang harus menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Karena itu, partisipasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dengan berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga dapat dijadikan indikator aktifitas politik dalam kegiatan pemilihan umum.

Perilaku pemilih dalam pemilihan umum itu juga sangat penting, dikarenakan apabila pelaksanaan Pemilu itu berjalan sukses, maka tentu saja perilaku pemilih itu sukses juga. Perilaku politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang ingin ditekankan ialah bagaimana perilaku politik dalam pelaksanaan kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses *voting* ataupun

pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dalam pertarungan perebutan suara ini partai politik tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk barang atau jasa kepada target pasarnya.

Para pemuda mempunyai komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepetingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas ideologi politiknya, lebih banyak memihak kepetingan umum dan sebagainya. Karakter tersebut mendorong partai politik agar lebih luwes dalam menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih pemula, sehingga mereka memberikan pilihan sesuai dengan yang diharapkan partai, dan dengan demikian diharapkan partai politik berhasil menggalang dukungan. Di Indonesia atau di negara maju sekalipun terdapat fenomena Golput yang secara kuantitatif berjumlah besar dan mereka berasal dari kaum muda. Secara teoritis, kaum muda diasumsikan mempunyai perilaku politik yang khas. Penelitian-penelitian tentang *voting behavior* di Amerika Serikat misalnya, menunjukkan bahwa para pemuda lebih tertarik dengan permasalahan-permasalahan politik, dan dalam melakukan tindakan politik secara kualitatif berbeda dengan golongan sebelumnya karena lebih bersifat keilmuan dan idealis.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan tersebut, partai politik diharuskan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat termasuk didalamnya adalah pemilih pemula, selain itu secara terus menerus membangkitkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Para pemilih pemula biasanya masih mencari partai atau figur yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Untuk itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk ditarik menjadi pendukung mereka. Pada kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjangkau dukungan, partai politik melakukan pengamatan terhadap kecenderungan pemilih pemula dalam memilih. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik seperti penyebaran himbauan lewat baliho, turun ke masyarakat dan kampanye seharusnya menjamin pemilih pemula akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap calon pemimpin yang akan memimpin. Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut *swing voters* sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat merugikan sistem politik karena jangan sampai akibat ulah mereka yang mudah atau dapat dibayar membuat pemimpin yang akan memimpin adalah pemimpin yang bisa dibeli.

Dari data awal yang peneliti dapatkan bahwa Desa Bongkudai Selatan memiliki jumlah penduduk 506 jiwa (kpu.go.id) dan pada pemilihan umum tahun 2019 dan Daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 404 pemilih. Tingkat partisipasi pemilih di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan data tersebut dapat dilihat tingginya presentase pemilih di Desa Bongkudai Selatan mencapai 79%. Adapun jumlah pemilih pemula di Desa Bongkudai Selatan sebanyak 186 pemilih atau sekitar 36% dari daftar pemilih tetap dan yang memilih sebanyak 506 orang. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tingginya jumlah pemilih pemula yang kemudian menjadi 'incaran' bagi pasangan calon dan tim sukses untuk mempengaruhi dan mendapatkan suara mereka dalam pemilu. (*sumber: Kantor PPK Desa Bongkudai Selatan.2019*).

Penelitian ini berfokus pada pemilih pemula di Desa Bongkudai Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang penduduknya yang cukup beragam dan plural. Dipilihnya Desa Bongkudai Selatan sebagai lokasi penelitian didasari akan tingginya pemilih pemula yang terdaftar pada DPT Desa Bongkudai Selatan. Maka itu penting bagi peneliti untuk memilih pemilih pemula sebagai permasalahan yang harus diteliti karena melihat beberapa gejala di atas dan pemilih pemula ini sangat mudah dipengaruhi. Apalagi suara pemilih pemula juga menentukan dalam pemilihan, sebab itu pemilih pemula jadi rebutan para kandidat.

Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Bongkudai Selatan terlihat bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang terutama pemilih pemula dalam memilih yakni yang pertama faktor sosiologis seperti asal daerah calon legislatif, dan hubungan keluarga dengan calon pemilih, yang kedua faktor psikologis yakni hubungan kedekatan yang dibangun oleh para calon anggota legislatif serta tim sukses untuk presiden dan wakil presiden dengan berbagai instrument seperti uang dan pemberian lainnya, yang ketiga faktor rasional yang berkaitan dengan program dan figure yang ditawarkan oleh partai dan juga track record yang dimiliki dari calon dan para tim sukses. Dari ketiga aspek tersebut, peneliti melihat di Desa Bongkudai bahwa faktor tersebut mempengaruhi para pemilih pemula dalam menentukan pilihan mereka.

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman ke era reformasi, bisa jadi perilaku pemilih sulit dibaca atau sulit ditebak. Maka peneliti melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perilaku pemilih tersebut. Dengan judul "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

TINJAUAN PUSTAKA

• Perilaku Politik

Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (*struktural functional analysis*), David Easton (*general systems analysis*), Karl W. Deutsch (*communications theory*), David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. (Budiardjo 2008: 10).

Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma dalam Mufti (2012:87), memberikan catatan penting mengenai perilaku politik yaitu:5 *Pertama*, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku

politik yang akan berkembang pada masa akan datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih baik menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Perilaku politik dapat di rumuskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, diantara kelompok dan individu dalam masyarakat menyangkut proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan-keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Menurut Robert K Carl bahwa perilaku politik adalah suatu telaah mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik. (Surbakti 2012:15)

Secara umum perilaku politik dapat diartikan sebagai buah pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga dan pemerintahan serta antara kelompok individu dalam masyarakat untuk proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik (2008:24) mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan umum secara langsung, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu: Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut (Ramlan Surbakti, 2012:15-16).

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok).

Menurut (Sobolim, 2013:76) Perilaku politik atau (Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.

Perilaku politik juga bisanya di pahami sebagai tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan - tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobyng, kaukus, kampanye dan demonstrasi)".

Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. terjadi pada situasi tertentu,
3. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. (Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan. 2007:12)

Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin

- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. (Sobolim, 2013)

- **Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter dalam Firmanzah (2007:101-102). Menurut dia pemilih mendapat informasi politik dalam jumlah besar atau (*overload*) dan beragam. Seringkali informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. Di tengah-tengah informasi yang melimpah ini pemilih dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit untuk memilih-milih informasi.

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu ; *Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan* (Fadillah Putra , 2008 : 201). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, Affan, 2007 : 43). Mazhab *Michigan* menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dimana pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Jika dikaitkan dengan Pemilukada, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya. Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Munir Mulkhan (2009:37) melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan warga negara biasa adalah pemilih pemula yang ada di Desa Bongkudai Selatan.

Menurut Dennis Kavanagh (dalam mukti sitompul, 2008:18), Perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan Struktural**

Pendekatan struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan

masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

Dalam pendekatan struktural, kita dapat melihat kegiatan pemilih ketika memilih, partai politik sebagai produk dari konteks struktur yang luas seperti struktur sosial masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang ditonjolkan partai-partai peserta pemilu. Dalam model ini, tingkah laku politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku. Dalam pendekatan ini melihat bagaimana perilaku pemilih dalam memilih berdasarkan kelas sosial, agama, bahasa, dan suku atau etnis. Dalam memilih jika kita lihat dari sisi pendekatan ini maka para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan subsistem pada penjelasan sebelumnya dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan merubah pemikiran mereka dalam menentukan pilihan.

2. Pendekatan Sosiologi atau Sosial Struktural

Istilah "Pendekatan" merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris, *approach*. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu, Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan dan pengetahuan untuk menerima dakwah.

Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama.

Menurut Lazarfeld (2012:23) dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkaran social memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam hal ini, metodologi pendekatan, penganalisisan, dan penelaahan gejala dan masalah geografi. Pendekatan ini menggunakan wilayah sebagai sasaran utama dalam melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setara dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya.

Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku-bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat memengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan mereka.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkahlaku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*).

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai - partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih.

Pendekatan psikologi lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau parlemen) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima.

5. Pendekatan Rasional

Menurut prespektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak

dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan *self-interest* (Rika 2009:45).

Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penjelasan sebelumnya dipersempit atau diperkecil menjadi tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang, seperti status sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas.

- **Pemilih Pemula**

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam, kedua pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka yang baru memasuki usia pemilih. (Dani 2010: 33).

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya (KPU : 2010). Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Dalam UU No. 7 tahun 2017, syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah (1) Umur sudah 17 tahun, (2) Sudah/ pernah kawin, (3) Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan (4) tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Pemilih pemula merupakan partisipan politik yang akan memilih calon-calon pemimpin elit-elit politik di masa depan, baik pada tingkat lokal (DPRD atau kepala daerah) maupun nasional (DPR atau Presiden/Wakil Presiden). Pada pemilihan umum serentak nasional yang diselenggarakan tahun 2019, suara pemilih pemula diperebutkan peserta pemilu atau calon. Jumlahnya yang mencapai sekitar 20-30% dari seluruh jumlah pemilih membuat suara mereka sering dijadikan untuk mendongkrak perolehan suara dan bisa menentukan kemenangan pihak yang berkompetisi dalam pemilu.

Mengacu pada data KPU untuk pilukada serentak 2017, diketahui jumlah pemilih pemula yaitu rentang usia 17 tahun hingga 20 tahun sebesar 14 juta orang. Sedangkan pemilih usia 20 tahun hingga 30 tahun sebesar 45,6 juta jiwa. Dibandingkan dengan data dari KPU pada pemilu 2014, jumlah pemilih pemula

mencapai sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada pemilu 2009 ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari (Suhartono : 2009:14). Jiwa muda dan cenderung coba-coba kerap mewarnai alur berpikir para pemilih pemula. Sebagian besar dari mereka hanya melihat momen pemilu sebagai ajang partisipasi dengan memberikan hak suara kepada partai politik dan tokoh yang mereka sukai. Antusiasme mereka untuk datang ke TPS tidak bisa langsung diterjemahkan bahwa kesadaran politik mereka sudah tinggi.

Pemilih pemula biasanya antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara karena untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya dan cenderung dimobilisasi. Budaya politik parokial mewarnai kebanyakan pemilih pemula dalam pemilu. Mereka membutuhkan pendewasaan politik sehingga mampu berpartisipasi aktif dan dapat berkontribusi positif dalam upaya menjaga dan menyukseskan demokratisasi.

Dengan jumlah pemilih pemula yang banyak, jangan sampai hak mereka sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan. Misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, akibatnya suaranya menjadi tidak sah.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. (Litbang Kompas Online: 2009:1)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Mogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2007:3) Strauss dan Corbin (2003:1), Basrowi & Suwandi, (2008:16). Focus penelitian ini adalah tentang perilaku pemilih pemula di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 yang dianalisis menggunakan teori dari Dennis Kavanagh (dalam Mukti Sitompul, 2004), yang mengatakan bahwa perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan pendekatan yaitu: Pendekatan Sosiologi, Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: Wawancara, Observasi, dan studi dokumentasi. Adapun yang dijadikan informan adalah: Pemilih Pemula, Masyarakat, dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dan proses analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan

dilapangan, mengenai perilaku pemilih pemula, serta menjelaskan keadaan subjek penelitian dengan seksama dan sesuai dengan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan umum sangat menentukan legitimasi terhadap partai yang berkuasa. Semua warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat, termasuk di dalamnya pemilih pemula, sehingga semua rakyat Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan pemilih pemula yang baru mempunyai hak suara untuk turut memilih dalam Pemilihan Umum pun menjadi penting.

Derajat partisipasi masyarakat di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Sebagian pemilih memiliki sikap dan pilihan politik yang tetap dalam memilih partai, akan tetapi sebagian perlu mempunyai perilaku memilih yang berubah-ubah. Sebagian masyarakat ikut memilih dalam pemilihan umum akan tetapi sebagian masyarakat memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini terjadi pula terhadap generasi muda termasuk pemilih pemula.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya untuk memilih kandidat yang akan dipilihnya, antara lain: (diambil dari modul KPU)

- a. *Social Imagery* atau Citra Sosial.
Citra social adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. Dengan kata lain, pemilih pemula tentu saja akan memilih kandidat yang memiliki strata social yang tinggi atau berasal dari golongan terpandang.
- b. Identifikasi Partai.
Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relative mempunyai pilihan yang tetap. Dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama. Dengan kata lain kandidat/partai mampu menjaga nama baik dan tetap eksistensi setiap pemilihan.
- c. *Emotional Feeling* (Perasaan Emosional).
Emotional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh policy politik yang ditawarkan. Merupakan sebuah keterikatan emosi kepada kandidat, karena memiliki karisma sehingga orang mudah percaya.
- d. *Candidate Personality* (Citra Kandidat).
Candidate personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan candidate personality adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya. Kepribadian kandidat juga mempengaruhi eleksibilitas pemilihnya.
- e. *Issues and Policies* (Isu dan Kebijakan Politik).
Komponen *issues and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang di janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Dapat dikatakan merupakan janji kandidat jika terpilih kelak. Hal ini menjadi senjata ampuh untuk menarik perhatian bagi pemilih pemula.
- f. *Current Events* (Peristiwa Mutakhir).
Current events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi

masalah domestik dan masalah luar negeri. Masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih. Seperti halnya tingkat kepedulian kandidat terhadap kondisi terkini, apakah dia hanya akan diam saja atau ikut turun serta di lapangan.

g. *Personal Events* (Peristiwa Personal).

Personal events mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya. Seorang kandidat yang memiliki latar belakang kehidupan yang baik akan sangat diminati karena figure seorang pemimpin dapat dilihat dari kehidupan pribadinya itu sendiri.

h. Pemimpin berjiwa *leadership* (pemimpin).

Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki jiwa seorang pemimpin. Maksud dari jiwa pemimpin disini adalah jiwa yang memiliki ketegasan dan *responsive* yang baik. Jangan sampai seorang pemimpin hanya menunggu dalam memecahkan permasalahan umat, akan lebih baik kalau seorang pemimpin memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu tindakan atau ikhtiar yang berguna bagi masyarakat luas. Karena Yang terpenting bagi seorang pemimpin bukan memaksa anggotanya menaati kepada perintahnya, tapi membuat paham apa yang terbaik yang harus dilakukannya dengan penuh kesadaran. Yang demikianlah merupakan pemikiran-pemikiran yang inisiatif dari seorang pemimpin.

i. Pemimpin bijaksana.

Seorang pemimpin haruslah bijaksana dalam hal membuat *policy* atau kebijakan yang akan diterapkan bagi masyarakat. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang dalam membuat suatu kebijakan dengan tujuan kepentingan dan kebaikan bersama. Pemimpin yang bijak, tak perlu kelihatan serba ahli menyelesaikan masalah, tapi justru memberi peluang anggotanya untuk kian terampil dan percaya diri dalam mengatasi masalah.

j. Pemimpin berakhlak mulia.

Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki akhlak yang mulia, akhlak terpuji. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul adalah kejujuran, disiplin, dan moral yang baik. Kekuatan seorang pemimpin sejati adalah kemampuan mengendalikan diri. Bagaimana mungkin memimpin orang lain dengan baik, bila memimpin diri tak sanggup. Maka amat sangatlah penting bagi seorang pemimpin memiliki akhlak mulia.

k. Pemimpin yang bertanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan salah satu faktor terpenting dari figur seorang pemimpin. Karena sikap melempar tanggung jawab tidaklah bagi seorang pemimpin karena kebiasaan melemparkan kesalahan dan tanggungjawab kepada orang lain, selain akan menambah masalah, juga akan menjatuhkan kredibilitas, dan menghilangkan kepercayaan seorang pemimpin.

Para pemilih pemula biasanya masih mencari afiliasi yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Untuk itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk

ditarik menjadi pendukung mereka. Pada kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjangkau dukungan, partai politik melakukan pengamatan terhadap kecenderungan pemilih pemula dalam memilih. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik seharusnya menjamin pemilih pemula akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Faktor Sosiologis

a. *Faktos Etnis Kedaerahan*

Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk kolektivitas. Jadi, etnisitas lebih mengacu kepada kolektivitas daripada mengacu pada individu. Ikatan ikatan etnis terwujud dalam kumpulan orang, kelengkapan-kelengkapan primordial seperti derajat, martabat, bahasa, adat-istiadat atau kepercayaan. Kelengkapan kelengkapan primordial tersebut dibebankan kepada setiap anggota yang dilahirkan dalam kelompok tersebut dan menjadikannya serupa dengan kelompok-kelompok lain. Dalam suatu etnis, ada karakteristik yang selalu melekat. Karakteristik tersebut adalah tumbuhnya perasaan berada dalam satu komunitas (sense of community) dan "kekitaan" di antara para anggotanya. Karena karakteristik tersebut maka munculah rasa kekerabatan.

Dalam politik praktis eksistensi faktor-faktor emosional dan sentimen psikologis yang biasanya terkait dengan faktor primordial dan SARA adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan dalam setiap kampanye. Seperti yang diungkapkan Abdul Asri Harahap (2005:116), bahwa:

"Penggunaan simbol-simbol primordialisme dan isu SARA untuk menarik dukungan dan bukannya melalui program-program yang ditawarkan sangat berkorelasi dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pada kandidat untuk mendekati masyarakat lebih menonjolkan pendekatan primordialisme. Hal ini tercermin dari ajakan untuk memilih dengan sentimen kesukuan, agama, golongan, dan wilayah tertentu."

Terkait dengan factor etnis kedaerahan, dari hasil penelitian, umumnya masyarakat memilih pasangan calon didasarkan pada isu wilayah asal kandidat. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Informan, J.H. (Laki-laki umur 18 tahun) seorang pemilih pemula Desa Bongkudai Selatan yang mengatakan:

"Saya memilih calon legislatif yang kebetulan adalah asli daerah sini, dan calon itu yang saya kenal dekat dibandingkan calon lain, karena satu kampung jadi saya pilih dia, untuk calon DPR RI dan DPD saya lihat saja yang saya tahu, kalau nda tahu atau kenal buat apa dipilih"

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa faktor etnis masih menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemilih di Desa Bongkudai Selatan tidak dapat dipungkiri etnik kedaerahan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih. Hal ini terlihat signifikan di Desa Bongkudai Selatan karena, masyarakat lebih cenderung melihat figure kandidat yang berasal dari satu daerah.

b. *Karakteristik seseorang dengan lingkungannya/ kekeluargaan*

Dalam era demokrasi sekarang ini terutama dalam kontestasi pemilihan umum, menuntut seseorang yang akan maju dalam pertarungan politik harus mampu dekat dengan masyarakat. Seorang calon pemimpin daerah maupun calon anggota dewan harus mampu mengambil hati masyarakat dengan membangun

hubungan kedekatan dan kekeluargaan, dengan pendekatan tersebut, maka seseorang akan mudah menaikkan elektabilitasnya.

Dalam pemilihan umum legislatif dan presiden ikatan kekeluargaan juga berpengaruh untuk membentuk pilihan seseorang kepala calon legislative. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga untuk membentuk pilihan seseorang juga sangat berpengaruh pada pemilihan umum di Bolaang Mongondow Timur terutama di Desa Bongkudai Selatan. Namun juga Persoalan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnik, usia, jenis kelamin dan agama menjadi faktor pendukung dalam melihat perilaku pemilih di lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana status sosial itu membentuk pola pikir dalam bertindak. Seseorang atau pemilih yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk khususnya di Provinsi Sulawesi utara termasuk pemilih yang terlibat dalam sebuah kelompok lembaga tertentu baik formal ataupun non formal akan mempengaruhi perilaku mereka.

Kandidat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau pemilih dengan cara menggunakan status ekonomi pemilih sebagai sebuah celah khusus dan melemparkan isu mengenai segalanya ada istilah gratis, maka dengan mudahnya kandidat memperoleh suara dari pemilih tersebut, apalagi sebagian besar dari pemilih yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara termasuk pemilih tradisional jika kita lihat berdasarkan jenis pekerjaan dan pendapatan perekonomiannya perbulan.

Selain status ekonomi dari pemilih, tingkat pengetahuan dan waktu luang dari pemilih sangat diperlukan agar mengetahui kandidat lebih dekat dan tahu kepribadian dari calon tersebut. Tapi dengan kesibukan yang dimiliki para pemilih mengakibatkan pilihan mereka sering dipengaruhi oleh keadaan lingkungan entah itu berasal dari lingkungan sekitar seperti tetangga dan tim sukses dan bahkan sampai pada pengaruh atau ajakan yang diberikan oleh birokrasi setempat.

Faktor lainnya seperti agama dan suku tidak terlalu berpengaruh karena pada pemilihan umum legislatif DPRD di Bolaang Mondongondow Timur kebanyakan kandidat masih merupakan putra dan putri asli daerah Boltim. Selain itu faktanya agama dari banyak kandidat adalah beragama Islam yang notabene adalah agama mayoritas di Kabupaten ini.

Menurut Bpk. Alry (laki-laki umur 46 tahun) warga Desa Bongkudai Selatan:

“waktu pemilihan umum tahun 2019, kami disajikan dengan banyak calon legislatif, jadi agak bingung untuk memilih siapa yang terbaik. Apalagi banyak yang kenal juga namun saya menetapkan pilhan pada siapa yang banyak peduli terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan yang tulus dan pilihan saya juga dipilih oleh anggota keluarga yang lain termasuk anak saya.

Sedangkan alasan lain bagi pemilih pemula untuk memilih seseorang dalam pemilihan umum terutama pemilihan umum tahun 2019. Salah satunya seperti yang diungkapkan M.M. (laki-laki umur 18) seorang warga Desa Bongkudai Selatan yang mengatakan:

“pada tahun 2019 saya ikut pemilihan umum untuk pertama kali, karena saya baru mendapatkan KTP dan secara aturan minimal memilih itu umur 17 tahun dan memiliki KTP serta terdaftar dalam DPT. Saya tidak mau katakan siapa yang saya pilih tapi yang jelas saya memilih pemimpin waktu itu karena ikut orang tua. Karena waktu itu saya bingung dan tidak tau apa-apa jadi saya ikut-ikutan saja.

Hal senada juga dikatakan oleh pemilih pemula lainnya yakni P.H. (Perempuan umur, 19) mengatakan:

“tahun 2019 waktu pemilihan umum legislatif dan eksekutif, saya ikut memilih juga. Saya memilih karena orang tua saya sudah punya pilihan, saya rasa tidak

enak apabila disuruh pilih lain, selain itu saya juga belum tau apa-apa. Tapi saya rasa lebih senang kalau yang jadi anggota dewan dari daerah sini saja."

Pemilihan umum tahun 2019 yang telah dilaksanakan, memberi gambaran kepada kita bahwa lingkungan dapat membentuk karakter seseorang dalam menentukan pilihan. Ungkapan yang dilontarkan para informan menjadi bukti bahwa lingkungan dapat memberikan kontribusi yang sangat kuat kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Entah itu pemilih yang memiliki intelektual maupun pemilih tradisional tidak lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor sosiologis tetap berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dari pemilih yang ada di Desa Bongkudai Selatan pada saat pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Hasil penelitian juga menyiratkan bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat.

Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya. Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi social ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan lain-lain. Namun, perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Pemilih pemula yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatarbelakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Perilaku pemilih pemula di Desa Bongkudai Selatan ini terlihat gampang untuk diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya karena banyak pemilih pemula yang masih labil. Orangtua sebagai orang terdekat sangat mempengaruhi pilihan anak mereka. Dari dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi politik dan cenderung intimidatif. Disamping itu proses sosialisasi yang juga mempengaruhi pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu tema dan kandidat lebih dominan diperoleh dari lingkungan sekolah dan teman.

2. Faktor Psikologis

Pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat lebih mempengaruhi psikologis pemilih pemula, Mengingat kecenderungan pemilih pemula menjatuhkan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variable-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan *impact* daripadanya. Untuk kasus terhadap pemilih pemula identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku dari perilaku orang tuanya.

Karakteristik pribadi juga turut berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula. Kepribadian yang terbuka terhadap sosial lebih memungkinkan seseorang menerima informasi politik dalam lingkungannya. Pemilih yang mengedepankan persoalan emosi semata, sifatnya sangat pragmatis dan mendukung nilai-nilai yang diperjuangkan calon yang akan dipilih. Yang penting calon bisa memberikan apa yang dibutuhkannya secara pragmatis. Seperti uang sogokkan untuk memilih, keikutsertaan dalam organisasi yang dibiaya calon, apalagi telah menjadi tim sukses calon tertentu.

Terkait keberadaan pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2019 lalu, anggota PPK Kecamatan Mooat, bapak, R.L. (laki-laki, 52 tahun), mengatakan:

"Dalam menyelenggarakan pemilu, kami sebagai penyelenggara berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satu focus kami adalah pemilih pemula yang notabene nya masih baru dan masih gampang dipengaruhi, oleh sebab itu kami untuk mendidik masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, panwaslu mengadakan sosialisasi dengan mengundang beberapa anak sekolah dan mahasiswa yang baru akan memilih pada tahun 2019 dengan memberikan pendidikan mengenai politik bagi mereka agar tidak mudah dipengaruhi apalagi dengan politik uang."

Dari hasil wawancara dengan M.M (laki-laki umur 18 tahun) seorang pemilih pemula dalam wawancaranya ketika ditanya mengenai factor pendorong pada saat memilih gubernur mengatakan bahwa:

"pemilihan umum tahun lalu saya ikut memilih, dan terus terang kami keluarga telah memiliki pilihan politik, namun saya hanya ikut karena orang tua saya adalah simpatisan partai politik dari dulu...namun saya juga yakin calon yang saya pilih adalah yang terbaik dari lainnya."

Faktor kepribadian akan berkaitan dengan figur seorang tokoh sebagaimana yang dihasilkan dari penilaian orang terhadapnya. Seseorang pemilih akan melihat apakah tokoh itu berkharisma, kelihatan peduli terhadap masyarakat atau menyangkut pencitraan terhadap seorang tokoh. Keterikatan kandidat dengan pemilih ini menjadi magnet yang luar biasa di tengah-tengah demokrasi modern sekarang ini. Dimana pemilih akan memilih hanya berdasarkan kedekatan dengan seorang kandidat atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat. Pemilih dalam menentukan pilihan yang didasarkan kedekatan emosional ini akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan demokrasi dimana akan ada sistem politik baru yang akan terbentuk yaitu politik dinasti. Dimana pemilih yang akan memilih berdasarkan kedekatan dengan penguasa yang terdahulu. Kejadian ini akan memberikan dampak buruk kepada daerah tersebut. Kita berkaca pada saat kepemimpinan presiden Soeharto yang membangun politik dinasti dengan sistem sentralisasi kekuasaan.

Secara psikologis hubungan emosional seseorang dengan orang lain akan mempengaruhinya dalam menentukan pilihan. Keterikatan dengan pemilih ini

menjadi senjata yang sangat baik dipakai oleh para kandidat untuk mendapatkan dukungan. Dimana pemilih akan memilih berdasarkan kedekatan dengan seseorang kandidat atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat. Pemilih dalam menentukan pilihan yang didasarkan kedekatan emosional.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat.

Menurut Sdri. P.H (perempuan umur 19 tahun) mengatakan:

“saya mengenal beberapa calon yang saya pilih waktu pemilihan umum tahun 2019 lalu, saya melihatnya karena factor track record mereka yang berpengalaman di bidang pemerintahan dan DPR, maka dari itu saya tidak ragu untuk memilih pilihan saya”

Keterlibatan aktor di balik layar membuat pemilih semakin yakin terhadap pilihannya. Karena dengan hadirnya sosok pemimpin yang mengikuti atau menyertai kandidat membuat nilai tambah buat kandidat. Keterikatan emosional bisa jadi pemicu seseorang tersugesti untuk merasa bahwa pilihannya adalah orang yang terbaik diantara orang-orang atau calon yang ada. Hanya berdasarkan dari kesamaan latar belakang ataukah istilah yang biasa kita dengar tentang etika balas budi dengan asas adanya kebaikan yang pernah kita terima dari seseorang hingga pada saat tertentu ada masa dimana kita merasa sepatasnya kita membalas semua itu.

3. Pendekatan Rasional

Memilih pimpinan baik eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR) merupakan memilih orang yang mampu menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Memilih pemimpin yang bisa mengentaskan masalah kemiskinan, mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur, dan macam ragam persoalan lainnya.

Untuk itu perilaku pemilih (voting behavior) dalam pemilihan umum memiliki posisi strategis dalam menentukan pemimpin. Lima menit di bilik kotak suara sangat menentukan nasib ratusan ribu bahkan jutaan rakyat di daerah. Perilaku atau sikap pemilih yang terbiasa dan kerap menggunakan pendekatan atas dasar rasa kedekatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu dihindari, sehingga penentuan pilihan calon pemimpin harus didasari kajian rasionalitas sesuai visi-misi dan program kerja calon.

Penentuan pemilihan calon pemimpin yang didasari karena primordialisme, kesamaan ideologi, afiliasi partai politik, kesamaan etnisitas, dan pragmatisme politik harus ditiadakan saat berada di kota suara. Sebab dapat dipastikan pola pendekatan demikian hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang akhirnya hanya akan menyusahkan dan menyengsarakan rakyat banyak, terutama calon yang ditawarkan adalah calon yang tidak berkualitas yang hanya mengejar popularitas dan kekayaan semata (mediaindonesia.com.pemilukada-dan-pendekatan-rasionalitas).

Mengubah pola pendekatan dalam memilih pemimpin dengan mengedepankan aspek rasionalitas berdasarkan bobot kekuatan visi-misi dan program kerja pasangan calon dapat menghasilkan calon pemimpin yang

berkualitas dan pendekatan ini pula merupakan salah satu cara menjadikan proses demokrasi di Indonesia berwibawa.

Menurut perspektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh.

Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Pilihan rasional salah satunya mengadopsi pemikiran Anthony Downs dalam karya klasiknya, *An Economic Theory of Democracy* (1957). Secara garis besar, pendekatan yang banyak dipengaruhi perspektif ekonomi itu menjelaskan pilihan politik seseorang sangat ditentukan kondisi ekonomi seseorang ataupun kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Pendekatan rasional ini sangat berpengaruh dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sayangnya pendekatan rasional yang berkembang saat ini merupakan pendekatan rasional yang sifatnya negatif. Dimana rasionalitas cenderung memunculkan politik uang. Masyarakat pemilih tidak terkecuali para pemilih pemula sudah terkontaminasi akut dengan sistem rasional negative ini.

Pendekatan rasional biasanya banyak ditemui dalam setiap kontestasi pemilihan umum di setiap daerah, dimana masyarakat cenderung lebih bersikap pragmatis dengan menerima pemberian dengan imbalan suara. Tak terkecuali di Desa Bongkudai Selatan kabupaten Bolaang Mondondow Timur. Hal terbukti dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Namun masih ada juga masyarakat pemilih yang dapat menjaga agar tidak terpengaruh dengan politik uang. Diantaranya, M.M (laki-laki umur 18 tahun) yang mengatakan:

“Saya ikut memilih dan saat itu tidak ada iming-iming uang untuk saya, walaupun itu pertama kali saya memilih, tapi saya sudah paham soal politik uang, tapi saya tidak mau tergoda, saya lebih tertarik kepada figur calon pemimpin yang ditawarkan parpol dan juga saya senang apabila seiman.”

Keberadaan politik uang ini diakui oleh R.L (laki-laki, umur 52 tahun) selaku PPK di kecamatan Mooat mengatakan:

“Setiap kandidat berhak melakukan pendekatan terhadap masyarakat, namun semuanya ada aturannya, bagi kami politik uang itu diharamkan dan dilarang juga secara undang-undang, namun kami sadari politik uang sulit dibendung,

ada-ada saja yang dilakukan oleh calon-calon untuk menyogok masyarakat. Oleh sebab itu semuanya ada regulasinya, apabila ketahuan akan disanksi secara pidana.”

Namun dari hasil wawancara dengan sebagian besar informan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Bongkudai Selatan lebih rasional dalam menentukan pilihan, lebih spesifik rasional pada kemampuan calon dan track record mereka serta visi misi yang mereka miliki.

Dalam prespektif politik rasional merupakan suatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi politiknya. Karena itu jika ada calon kandidat yang tidak bisa menawarkan programnya dengan baik pada sebuah pilihan, terutama didepan para pemilih-pemilih yang rasional maka kandidat tersebut akan sulit untuk menang. Untuk menjelaskan sebelumnya maka akan dikaji melalui pertimbangan-pertimbangan kalkulasi untung rugi dan kemampuan pemilih untuk menelaah segala program yang diajukan oleh calon kandidat.

Identifikasi rasional terhadap pemilihan umum yang berupa ciri-ciri, figure, harapan, dan kemampuan calon mengakomodasi kepentingan pemilih. Identifikasi terhadap figur bisa pula menjadi basis analisis hasil pencitraan atau mengunggulkan figur calon dalam kompetisi pemilihan umum. Pemilih pemula dalam memilih tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

Dari hasil penelitian dilapangan dapat dikatakan bahwa rasionalitas pada pemilih pemula tidak lepas dari informasi yang didapatkan di lingkungan keluarganya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa alasan rasional berkaitan dengan adanya pengaruh sosiologis dikalangan pemilih pemula, dimana pilihan pemilih pemula dipengaruhi oleh informasi yang diserap di lingkungan keluarganya dan menyebabkan preferensi pilihan pemilih pemula sama dengan orangtua mereka.

PENUTUP

1. Faktor sosiologis bagi pemilih pemula sangat berpengaruh pada pemilihan umum tahun 2019 khususnya di desa Bongkudai Selatan, yakni hubungan keluarga yaitu orang tua berperan penting dengan preferensi pilihan politik pemula serta factor kedaerahan. Praktek sosialisasi politik dikeluarga tanpa disadari terjadi dan mempengaruhi pemilih pemula. Indikasi intimidasi/pemaksaan atas pilihan politikpun terjadi meskipun dengan cara yang halus. Selain itu pendekatan kedaerahanpun masih cukup kuat di Desa Bongkudai Selatan.
2. Dalam pendekatan psikologis, sangat berhubungan erat dengan sosiologis, dimana pertimbangan pemilih pemula dalam menentukan pilihan terletak pada hubungan suku, agama. Jadi dalam prakteknya, factor sosiologis berhubungan erat dengan psikologis.
3. Pendekatan Rasional, merupakan salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon dalam kontestasi pemilihan umum. Visi misi, serta figure calon mendominasi preferensi politik bagi masyarakat, tak terkecuali bagi pemilih pemula. Selain itu factor untung rugi bagi pemilihpun masih ada dalam pemilihan umum tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulkhan A.M. 2009. *Politik Santri*. Yogyakarta: Kanisius
- Harahap A.A.. 2005. *Paradigman baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Strauss A. & Corbin.J. 2003. *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, M, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Dani W. 2010. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2009*. Semarang: Unnes Semarang.
- Efriza.2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung:Alfabeta
- Firmanzah, 2007. *Marketing politik*. Jakarta: yayasan obor Indonesia,
- Fadila P, 2008. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Mufti, M. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mukti Sitompul. 2005. "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden 2004 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FISIP USU Angkatan 2003)". *Jurnal Wawasan*, Volume 11, Nomer 1, Juni 2005
- Ridwan, M. 2007. *Perilaku Politik NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*.
- Suhartono.2009. *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)*. Bandung: UPI
- Subakti, R, dkk,2008. *perekayasaan sistem pemilihan umum untuk pembangunan tata politik demokratis, kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Sumber Lain:
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum